

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA BINTANG MERIAH KECAMATAN BATANG KUIS

KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

KIKI AHDA NASUTION
NIM: 0103162020

Program Studi :Pengembangan Masyarakat Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA BINTANG MERIAH KECAMATAN BATANG KUIS

KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

KIKI AHDA NASUTION

NIM: 0103162020

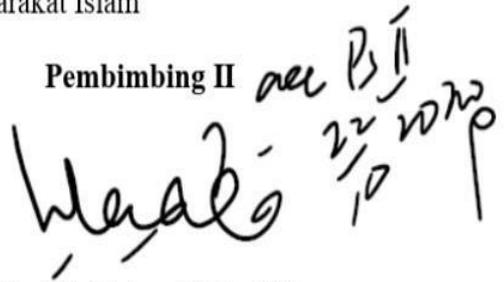
Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I



Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP 19661019 200501 1 003

Pembimbing II



Dr. Hj. Fatma Yulia, MA
NIP:197607212005012003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Medan, 22 Desember 2020

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas

Dakwah dan Komunikasi

UIN- Sumut

Di- Medan

Nomor: Istimewa

Lamp :

Hal : Skripsi

An. Kiki Ahda Nasution

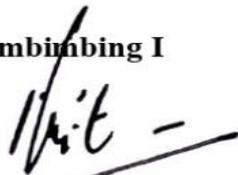
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Kiki Ahda Nasution yang berjudul; "**Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang**", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

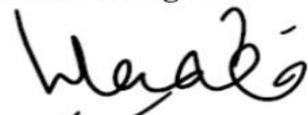
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP 19661019 200501 1 003

Pembimbing II



Dr. Hj. Fatma Yulia, MA
NIP:197607212005012003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Kiki Ahda Nasution

Nim :0103162020

Tempat/Tanggal Lahir :Medan, 13 Februari 1998

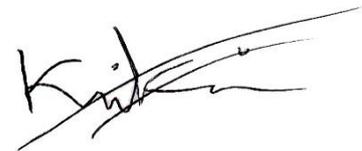
Program Studi :Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi :Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan ini hasil jiplakan maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 22 Januari 2021

Penulis



Kiki Ahda Nasution
NIM.0103162020

ABSTRAK



Nama :Kiki Ahda Nasution

NIM :0103162020

Fak/Jur :Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat

**Judul :PeranPendamping Desa dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa Bintang MeriahKecamatan Batang
Kuis Kabupaten Deli Serdang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Bintang Meriah. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan peneliti sebagai berikut, perlunya peran pendamping desa tersebut untuk memfasilitasi masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang ditemukan sebagai sebuah tantangan pendamping desa yaitu, tidak semua pendamping yang ditempatkan di desa dapat secara maksimal berperan dan menerapkan ilmu, pengetahuan dan keterampilannya di desa, karena di setiap lokasi desa memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Cara mengatasi kendala yang dihadapi pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Bintang Meriah, yaitu pendamping desa diperlukan pelatihan dan pendidikan (Diklat) tentang manajemen pembangunan di desa, kemudian memiliki fase pengabdian menjadi asisten pendamping terlebih dahulu, sebelum menjadi pendamping desa.

Katakunci :Pendamping, Desa, Masyarakat

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh ummat manusia. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan ummatnya hingga akhir masa.

Proposal yang berjudul: **“Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Didalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang pastinya tidak lepas dari khilaf dan salah. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang kedepannya akan membantu penulis dalam memperbaiki karya ini.

Penulis juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya banggakan, Ayahnda Ali Sakti Nasution dan Ibunda Sartik Saragih yang selalu mendoakan saya tidak putus-putusnya serta memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta

adik-adikku tersayang Sindi Mayuni Nasution dan Andre Nasution dan untuk seluruh keluarga yang memberi semangat dan dukungan.

2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yang telah memberikan wadah dan memfasilitasi selama belajar di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Lahmuiddin, M.Ed selaku Dekan, Bapak Dr. Rubino MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syawaluddin Nst, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU, beserta civitas akademik yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa.
4. Bapak Dr. Annaisaburi Nst, M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU yang telah memberikan kebijaksanaan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA dan Ibu Dr. Hj. FatmaYulia, MA, selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan II yang sangat luar biasa telah memberi arahan dan masukan yang sangat membantu serta meluangkan waktunya untuk penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Bambang Hartoko, SH dan Bapak Efrisal Rambe selaku Kepala Desa dan Pendamping Desa, Abang Suwandi Spd yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

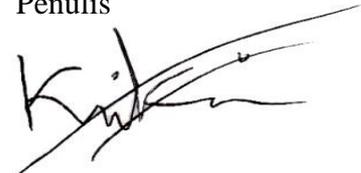
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan keluarga besar PMI-B angkatan 2016 terkhusus, Lailan Safina, Diki Pangestu Pais, Nur Apriani, Jamal Abdul Nasir Siregar dan sahabat saya dari fakultas Tarbiyah Nur Aisyah penulis ucapkan semoga ukhuwah kita tetap terjaga hingga nanti sukses ke depannya, dan menjadi kaum Intelektual.

Akhirnya penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaannya, oleh karena itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Semoga skripsi ini ada manfaatnya untuk kita semua, terkhusus untuk penulis sendiri sebagai karya yang pertama, dan sembari mengharapkan semoga Allah SWT meridhoi kerja dan usaha-usaha yang telah dikerjakan selama ini. Aamiin.

Medan, 22 Januari 2021

Penulis



Kiki Ahda Nasution
NIM: 0103162020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Batasan Istilah	5
F. Pembatasan Masalah	6
G. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	7
1. Pengertian Peran.....	7
2. Tugas Seorang Pendamping	7
3. Pengertian Pendamping Desa.....	8
4. Tujuan Pendampingan Desa	8
5. Kualifikasi tenaga pendamping masyarakat desa	8
6. Problematika dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendamping Desa	10

7. Hubungan/Kaitan Pendamping Desa dengan Pengembangan Masyarakat Islam...	11
8. Pengertian Pemberdayaan	12
9. Tujuan Pemberdayaan.....	13
10. Strategi Pemberdayaan.....	16
11. Proses Pemberdayaan.....	17
12. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	19
13. Tahapan Pemberdayaan	23
14. Pemberdayaan menurut Islam	25
15. Pengertian Masyarakat	26
16. Ciri-Ciri Masyarakat	27
17. Tipe-Tipe Masyarakat	28
18. Pandangan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Masyarakat	31
19. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Al-Qur'an.....	34
20. Pengertian Desa.....	36
B. Kajian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Informan Penelitian	41
E. Sumber Data Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44

H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa Bintang Meriah	48
B. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	48
C. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah	51
D. Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan	55
E. Keunggulan dan Hambatan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Desa	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Bintang Meriah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, luas 0,65 km², jumlah penduduk 6640 jiwa dan kepadatan 50 jiwa/km². Setiap pertahun pertumbuhan penduduk di Bintang Meriah meningkat 5 persen, ditahun 2016 jumlah pertumbuhan penduduk yang laki-laki lebih tinggi daripada jumlah penduduk yang perempuan. Berdasarkan penjelasan tersebut laki-laki jumlahnya 3347 sedangkan perempuan jumlahnya 3293. Desa Bintang Meriah dihuni penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Islam, Kristen, Katholik, Budha. Islam jumlah penduduknya 6446 sedangkan Kristen:130, Katholik:28, Budha:36. Dengan total jumlah penduduk berjumlah 6640 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 5 persen pertahun dengan kepadatan rata-rata 50 jiwa per kilometer persegi.

Desa Bintang Meriah ini masih banyak dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penganggaran pengalokasian anggaran dana desa, kurang berpartisipasi dan kurang kesadaran masyarakat desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan, keterbatasan pembangunan sarana dan prasarana desa. Keterbatasan ini yang memunculkan minimnya pembangunan sarana prasarana pelayanan publik tersebut yang ditujukan untuk masyarakat desa.

Jadi, perlunya pendamping desa tersebut untuk memfasilitasi masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Pendamping di Desa Bintang Meriah yaitu berupa pendampingan yang bersifat *partisipatoris*, yang terfokus pada pengembangan pertanian dan kemandirian petani padi. Pengembangan ini berupa peningkatan *skill* dan kemampuan masyarakat dalam hal pengolahan padi secara maksimal sehingga di harapkan dengan adanya kemampuan dan skill ini menjadi perantara kemakmuran masyarakat petani padi. Peningkatan kreatifitas ini berupa *experiment* bersama masyarakat seperti halnya *experiment* pembuatan pakan ternak dari batang jerami padi, kompos jerami padi sebagainya. Namun *experiment* bersama ini akan dilakukan atas dasar *inisiatif*, persetujuan dan pilihan masyarakat. Namun pengembangan kreatifitas ini lebih terfokus pada pembentukan secara bekal. Secara general fokus pendampingan ini tertuju pada peningkatan ekonomi.¹

Program pendampingan Desa Bintang Meriah yang diberlakukan oleh pemerintahan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan *kapasitas*, *efektifitas* dan *akuntabilitas* pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

¹ Efrisal, Pendamping Desa Bintang Meriah, Wawancara, (Medan, 18 Juli 2020). Pada Pukul: 14:00 WIB

2. Memfasilitasi dalam meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan.
3. Memfasilitasi dalam peningkatan sinergi program pembangunan desa antar sektor.

Pemberdayaan yang dilakukan di Desa Bintang Meriah adalah pemberdayaan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya dan sosial. Penulis hanya meneliti pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan sosial di Desa Bintang Meriah dan pendamping desa tersebut sudah membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan seperti ibu hamil dan stunting dan bidang sosial seperti memberi bantuan keluarga tidak mampu dan kemalangan. Adapun pelaksanaan pendampingan desa yang telah berhasil di daerah lain yaitu Desa Dasidut II Kecamatan Serbajadi Kabupaten Sergai, desa ini sudah melakukan pelaksanaan pendampingan desa kegiatan pembangunan jalan, pemberian program bantuan covid tepat sasaran dan pelaksanaan tata kelola desa.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan perlu melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Masih banyak dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penganggaran pengalokasian anggaran dana desa.
2. Kurang berpartisipasi dan kurang kesadaran masyarakat desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan.
3. Keterbatasan pembangunan sarana dan prasarana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan ada tiga permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang?
3. Apa saja keunggulan dan hambatan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui keunggulan dan hambatan pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami dan menerjemahkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam penulisan judul ini antara lain :

1. Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan antara lain swadaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas produksi.²
2. Masyarakat adalah sekelompok, maupun satu kesatuan yang menjalin hubungan sosial serta ikatan-ikatan kasih sayang yang baik antara satu dengan yang lain.³

² Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 177.

³ M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco), hlm. 63.

F. Pembatasan masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka peneliti membuat pembatasan masalah pemberdayaan di bidang kesehatan dan sosial di Desa Bintang Meriah yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah yang dibuat adalah Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

G. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya mengenai kajian tentang kebijakan pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri melalui peran pendamping desa yang ditempatkan diberbagai Provinsi, Kabupten, Kecamatan, dan Desa.

2. Secara Praktis

Memberikan tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai tugas dan fungsi dari pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah *person task or duty in undertaking*, artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.⁴ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵

2. Tugas Seorang Pendamping

Seorang pendamping memiliki tugas pokok untuk: ⁶

- a. Mengidentifikasi calon warga belajar.
- b. Memfasilitasi setiap pembelajaran;
- c. Membantu warga belajar mengelola kegiatan belajar mandiri.
- d. Membantu dalam proses pembuatan produk dari hasil kegiatan belajar mandiri.
- e. Memberikan motivasi belajar mandiri secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

⁴ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 62

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, hlm. 854

⁶ Mulyati Purwasasmita, *Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat*, Vol. 18, N0. 3

3. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa.⁷ Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator komunikator dan dinamisator serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok.⁸

4. Tujuan Pendampingan Desa

Tujuan pendampingan desa meliputi:⁹

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan deesa antarsektor.
- d. Mengoptimalkan aset lokal desa secara *emansipatoris*.

5. Kualifikasi Tenaga Pendamping Masyarakat Desa

Kualifikasi tenaga pendamping masyarakat desa, kualifikasi tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat desa memiliki acuan baku yang dirumuskan oleh Tim Persiapan Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator

⁷ News.Okezone.Com,<http://repository.radenintan.ac.id/5235/1/SKRIPSI.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020, 12:30 WIB.

⁸ Coastal Community Development Project (CCDP), Petunjuk *Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: CCDP, 2015), hlm. 45

⁹ Martien Herna, *Pendamping Desa dan Desa Mandiri*, Vol.37 No.1 2017 Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2020, Pada Pukul 14:00. WIB.

Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan British Council (Sumpeno, 2009). Adapun kualifikasi yang dimaksud digolongkan kepada tiga kompetensi, yakni kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus.

1. Kompetensi umum meliputi :
 - a. Membangun relasi sosial.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat.
 - c. Menyadarkan kebutuhan masyarakat.
 - d. Melaksanakan fasilitasi pembelajaran.
 - e. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan.
 - f. Membangun visi dan kepemimpinan.
2. Kompetensi inti meliputi :
 - a. Membangun jejaring dan kemitraan.
 - b. Membangun modal sosial.
 - c. Membangun kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan.
 - d. Merancang perubahan.
 - e. Mendesain proses pembelajaran.
 - f. Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat.
 - g. Mengembangkan kemandirian masyarakat.
 - h. Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan.
 - i. Mengelola konflik.
 - j. Mengembangkan sistem sanksi reward and punishment.

3. kompetensi khusus meliputi:
 - a. Mengembangkan ide, metoda, produk baru di bidang/ sektor kegiatan tertentu.
 - b. Memfasilitasi penerapan ide, metoda, produk baru di bidang/sektor kegiatan tertentu.¹⁰

6. Hambatan dan Problematika Dalam Pelaksanaan Pendamping Desa

Hambatan dalam pelaksanaan pendamping desa yaitu:¹¹

- a. Gaji yang diberikan masih sangat rendah tidak sesuai dengan beban kerjanya.
- b. Masih terdapat beberapa desa yang letaknya berjauhan sehingga PLD kesulitan untuk melakukan pendampingan bagi 1 sampai 4 desa.

Adapun problematika pendamping pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas.

- a. Aspek kuantitas.

Problematika adalah persoalan yang dihadapi oleh individu, kelompok dan lembaga. Jika dilihat pada aspek kuantitas berarti fokus utamanya adalah menganalisis suatu persoalan dalam perspektif jumlah. Problematika pendamping pemberdayaan masyarakat desa dalam aspek kuantitas adalah melihat persoalan-

¹⁰Icol Dianto, *Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan*, Vol. 18, N0. 2. Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2020

¹¹ Firly Nur Agustiani, *Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa*, Vol. IV. Ed. 17 Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020, Pada Pukul 19:00. WIB

persoalan yang muncul yang disebabkan oleh faktor kuantitas atau jumlah tenaga pendamping desa yang tersedia.

b. Aspek kualitas.

Aspek kualitas mendeskripsikan penguasaan pendamping desa terhadap materi pemberdayaan. Penguasaan yang bersifat akademis dan teori-teori pemberdayaan mesti dikuasai dengan baik. Penguasaan materi pemberdayaan ini terletak pada beberapa hal, yaitu tenaga pendamping desa mendapatkan materi pemberdayaan melalui pendidikan formal dan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Selain penguasaan materi, keterujian penggunaan materi dengan penyelesaian masalah yang dihadapi juga menunjukkan kualitas akademis individual, yang lebih dikenal dengan pengalaman.¹²

7. Hubungan/Kaitan Pendamping Desa dengan Pengembangan Masyarakat Islam

Pengertian pengembangan masyarakat Islam adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan keadilan sosial.¹³ Pemberdayaan adalah salah satu bagian dari pengembangan masyarakat Islam dan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.¹⁴ Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk

¹²*Ibid*, hlm. 76

¹³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4

¹⁴ Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 43

memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.¹⁵ Pendamping Desa adalah salah satu subjek yang melaksanakan misi dari pengembangan masyarakat Islam dan bagian dari pengembangan masyarakat Islam, karena pendamping desa ini melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan.

Dari sini saya simpulkan bahwa hubungan atau kaitan pendamping desa dan pengembangan masyarakat Islam sangat interaktif yang artinya jurusan PMI atau jurusan pengembangan masyarakat Islam sangat berperan signifikan terhadap pendampingan desa maupun pengembangan desa, seperti pemberdayaan kepada masyarakat, membangun kemandirian masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

8. Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁶ Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu,

¹⁵ James A. Cristenson, Jerry W. Robinson, *Community development in perspective*, (Jr Ames: Ioa State Univercity Press, 1989), hlm.78

¹⁶ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm. 42.

dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁷ Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

9. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).¹⁸ Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.

¹⁷ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm. 145.

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005), hlm. 60

- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga.¹⁹

Menurut Mardikanto (2015) dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat oleh Dedeh Maryani dan Rruth Roseline E. Nainggolan, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:²⁰

- a. Perbaiki Kelembagaan "*Better Instution*"

Dengan perbaikan tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

¹⁹*Ibid*, hlm. 60

²⁰ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hlm. 9.

b. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya.

c. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”²¹

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah atau faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

e. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada kolerasi dengan keadaan lingkungan yang membaik

²¹*Ibid*, hlm. 9

pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki Masyarakat “*Better Community*”

Bila setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti di dukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²²

10. Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Oleh karena itu, pengertian strategi sering tidak teratur dengan metode, teknik atau taktik.²³

Strategi merupakan cara yang menghasilkan produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan. Strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai 3 arah, yaitu: *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam

²²*Ibid*, hlm. 10.

²³ Sri Handini, Sukesi, Hartati Kanti Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 75.

pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.²⁴ Dalam hal ini, Ismawan (Piyono 1996) menerapkan adanya 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia,
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok,
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta),
- 4) Pengembangan usaha produktif,
- 5) Penyediaan informasi tepat guna.²⁵

Pemberdayaan telah mengalami perkembangan makna dalam konteks sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi pemberdayaan benar-benar diupayakan untuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat bisa berdaya baik secara sosial ekonomi, budaya, politik, maupun bidang kehidupan lainnya sehingga pemberdayaan ini yang memacu untuk pembangunan di Inonesia.²⁶

11. Proses Pemberdayaan

Berdasarkan proses pemberdayaan, salah satunya pengembangan, yaitu masyarakatnya sudah tidak lagi memiliki pola pikir yang lama, tetapi sudah memulai berfikir menuju perubahan hidup untuk mencukupi kebutuhan. Artinya sikap mental dan kebiasaan lama yang menjerumuskan mereka mulai ditinggalkan

²⁴*Ibid*, hlm. 76

²⁵*Ibid*, hlm. 77

²⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset), hlm. 153

dan mereka mulai beranjak ke pola kehidupan baru. Kemudian merujuk kepada tujuan pemberdayaan menurut Totok Mardikanto, yaitu pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Implementasinya alumni pelatihan masih memiliki pola pikir yang lama dan tidak mengalami perkembangan. Mereka masih menikmati sikap mental yang menjerumuskan mereka selama ini. Sikap mental tersebut seperti perasaan takut gagal dalam usaha, tidak memiliki kemampuan dalam meminjamkan modal. Selain itu, belum adanya kelompok tani yang terbentuk dan usaha tani yang berkembang.²⁷

Proses pemberdayaan terbagi menjadi dua yaitu di bidang sosial dan bidang kesehatan. Pemberdayaan bidang sosial adalah sikap yang dilakukan masyarakat untuk mengelola, mengantisipasi, serta melakukan tindakan yang positif dalam proses perubahan sosial yang berkembang. Sikap ini haruslah di dukung dengan tindakan dalam bentuk kemandirian setiap masyarakat. Contoh pemberdayaan di bagian bidang sosial adalah memberi bantuan keluarga tidak mampu, kemalangan, dan lain-lainya.

Sedangkan pemberdayaan bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Contoh pemberdayaan di bagian kesehatan adalah stunting (masalah anak pendek). Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga

²⁷Yefni, "Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat," Masyarakat Madani, III, 02 (Desember, 2018), hlm. 53-54

perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Di Indonesia, berdasarkan Riskesdas 2013 terjadi peningkatan anak stunting dari 36,8% pada tahun 2010 menjadi 37,2% pada tahun 2013. Selama 20 tahun terakhir, penanganan masalah stunting sangat lambat. Secara global, persentase anak-anak yang terhambat pertumbuhannya menurun hanya 0,6 persen per tahun sejak tahun 1990. WHO mengusulkan target global penurunan kejadian stunting pada anak dibawah usia lima tahun sebesar 40 % pada tahun 2025, namun diprediksikan hanya 15-36 negara yang memenuhi target tersebut.²⁸

12. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.²⁹

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara

²⁸ Mitra, *Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan) Stunting Problems and Interventions to Prevent Stunting (A Literature Review)*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2. No.6

²⁹ Sri Najiyati, Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme, 2005), hlm. 54-60

pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai.

Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya.³⁰

b. Partisipatif

Dalam praktek, pemerintah dan praktisi pemberdayaan masyarakat belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhannya. Mereka terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin melihat hasil pemberdayaan secara fisik. Sementara itu, masyarakat dibebani target untuk mencapai kemajuan yang sangat

³⁰*Ibid*, hlm. 54-60

cepat tanpa memperhitungkan kemampuannya. Tenaga pendamping yang melakukan kegiatan pemberdayaan melihatnya sebagai tugas kelembagaan yang penuh dengan nuansa target dan kontrol yang ketat. Berbagai bantuan datang bertubi-tubi dan dirasakan membebani, karena mereka harus mempertanggung jawabkannya, meskipun sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan proyek tersebut.

Mereka mau menerima proyek karena dijanjikan suatu bantuan tanpa harus bersusah payah memperolehnya. Akibatnya, tiada tantangan atau kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan prakarsa dan keswadayaannya. Dengan pendekatan semacam itu, perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat seolah-olah dilakukan secara efisien, namun sesungguhnya kemandirian masyarakat tidak dapat tumbuh secara sehat. Itulah sebabnya sering ditemukan proyek yang dibiayai pemerintah kurang terpelihara dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, proyek-proyek swadaya murni yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh masyarakat jarang terselesaikan. Broody dan Rogers dalam Sutrisno dan Widodo, mengatakan bahwa kemandirian masyarakat akan tumbuh dalam lingkungan yang banyak pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian. Selanjutnya, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya.

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan,

dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.³¹ Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan

Banyak program pengembangan masyarakat yang memanifestasikan strategi membagi-bagikan bantuan cuma-cuma daripada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam upaya membangun dirinya sendiri. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan serba sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma masyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

Bantuan dari orang lain yang bersifat materi harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip mulailah dari apa yang mereka punya, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya

³¹*Ibid*, hlm. 54-60

pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.³²

d. Berkelanjutan

Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berskala proyek yang tegas batas waktu dan pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek semacam itu biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

13. Tahapan Pemberdayaan

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:³³

³²*Ibid*, hlm. 54-60

³³ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta :LP FEUI, 2002), hlm. 54

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu : pertama, penyiapan petugas, tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara *non direktif*.

b. Tahap Pengkajian

Pada tahap ini yaitu dapat melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Pemformulasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan, menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformulasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program

yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.³⁴

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.³⁵

14. Pemberdayaan menurut Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam jurnal pengembangan masyarakat Islam

³⁴Ibid, hlm. 54

³⁵Ibid, hlm. 54

bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun diakhirat.³⁶ Menurut Agus Ahmad Syarfi'i, pemberdayaan dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.³⁷

15. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau karena dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.³⁸

Berikut definisi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Linton (seorang ahli *antropologi*) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M. J. Heskovits menulis, bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J. P. Gilin mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan

³⁶ Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, hlm. 427

³⁷ Agus Ahmad Syarfi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2007), hlm.70

³⁸ Hassan Shadili, *Sosiologi Untuk Masyarakat*, (Surabaya: Pustaka Sarjana, 1980), hlm.31

yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang kecil.³⁹

- d. S. R. Steinmetz memberikan batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur.
- e. Mac Iver yang berbunyi bahwa masyarakat adalah satu sistem daripada cara kerja dan prosedur, daripada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan dan tingkah laku manusia dan kebebasan.⁴⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan individu yang membentuk kelompok manusia yang saling pengaruh mempengaruhi, berhubungan dan hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan kasta.

16. Ciri-Ciri Masyarakat

Masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ada interaksi antara sesama anggota masyarakat

Di dalam masyarakat terjadi interaksi sosial yang merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan, antara kelompok-kelompok, maupun antara perseorangan dengan kelompok.

- b. Menempati wilayah dengan batas-batas tertentu.

Suatu kelompok masyarakat menempati suatu wilayah tertentu menurut suatu keadaan geografis sebagai tempat tinggal komunitasnya, baik dalam

³⁹Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 88

⁴⁰*Ibid*, hlm. 89

ruang lingkup kecil RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara.

c. Saling tergantung satu dengan yang lainnya

Anggota masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu saling tergantung satu yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan sosial, ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup bahkan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada manusia lain. Tiap-tiap individu pada masyarakat memiliki keterampilan, profesi dan potensi masing-masing serta saling melengkapi.

d. Memiliki adat istiadat/budaya tertentu

Adat istiadat dan budaya diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang mencakup bidang yang sangat luas diantara tata cara berinteraksi antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, apakah itu dalam perkawinan, kesenian, mata pencaharian ataupun sistem kekerabatan dan sebagainya.

e. Memiliki identitas bersama

Kelompok masyarakat memiliki identitas yang dapat diketahui oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini berguna untuk menopang kehidupan dalam bermasyarakat yang lebih umum. Identitas kelompok dapat berupa lambang-lambang, bahasa, pakaian, simbol-simbol tertentu, seperti alat pertanian, senjata tajam, kepercayaan dan sebagainya.⁴¹

⁴¹Dodiet Aditya Setyawan, *Konsep Dasar Masyarakat*, (Surakarta: Program Studi Diploma IV Komunitas Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes, 2012), hlm. 3-4.

17. Tipe-Tipe Masyarakat

Menurut Gilin dan Gilin lembaga masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan perkembangan

1. *Cressive Institution*

Lembaga masyarakat yang paling mendasar, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, misalnya yang menyangkut hak milik, perkawinan, agama dan sebagainya.

2. *Enacted Institution*

Lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya yang menyangkut lembaga utang-piutang, lembaga perdagangan, pertanian, pendidikan yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut di sistematisasi yang kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang di sahkan negara.

b. Berdasarkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat

1. *Basic Institution*

Basic Institution Adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, diantaranya keluarga, sekolah-sekolah yang dianggap sebagai institusi dasar yang pokok.

2. *Subsidiary Institution*

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lahir tetapi dianggap kurang penting, karena untuk melengkapi kegiatan-kegiatan tertentu saja.

Misalnya pembentukan panitia rekreasi, pelantikan/wisuda bersama sebagainya.

c. Berdasarkan penerimaan masyarakat

1. *Approved atau Social Sanctioned Institution*

Adalah lembaga yang disetujui oleh masyarakat seperti sekolah, perusahaan, koperasi dan sebagainya.⁴²

2. *Unsanctioned Institution*

Adalah lembaga yang dicegah oleh masyarakat walaupun kadang-kadang masyarakat tidak dapat memberantasnya, misalnya kelompok penjahat, pemeras, pelacur, gelandang, pengemis dan sebagainya.

d. Berdasarkan penyebarannya

1. *General Institution*

Adalah lembaga masyarakat di dasarkan atas faktor penyebarannya, misalnya agama karena dikenal hampir semua masyarakat didunia.

2. *Restricted Institution*

Adalah lembaga-lemba agama yang dianut oleh masyarakat tertentu saja misalnya Budha banyak dianut oleh Muangthai, Vietman, Kristen Katolik banyak dianut oleh masyarakat Itali, Prancis. Islam oleh masyarakat Arab dan sebagainya.

e. Berdasarkan fungsi

1. *Operative Institution* adalah lembaga masyarakat yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga industri.

⁴²Nasrul Effendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1998), hlm. 92.

2. *Regulative Institution* adalah lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak daripada lembaga itu sendiri, misalnya lembaga hukum diantaranya kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.⁴³

18. Pandangan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dakwah bil hal yang mana bentuk tindakan nyata diharapkan dapat mengembangkan dakwah yang efektif mengacu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas keislamannya, sekaligus juga kualitas hidupnya. Dakwah ini diharapkan tidak hanya mengisyaratkan hal-hal yang religius Islami namun juga menumbuhkan etos kerja. Dakwah bil hal ditentukan pada sikap, perilaku dan kegiatan-kegiatan nyata yang interaktif mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan kualitas keberagaman.⁴⁴ Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung, antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwwah*, Prinsip

⁴³*Ibid*, hlm. 92.

⁴⁴Munir, *Metode dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 233

ta'awun, dan Prinsip *persamaan derajat*, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini.⁴⁵

Pertama, prinsip *ukhuwwah*. *Ukhuwwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat [49]:10).⁴⁶

Rasulullah SAW mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Di hadist lain, Beliau berpesan bahwa umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, di mana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Dalam konteks pemberdayaan ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

⁴⁵Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 39 No. 1

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (J-ART, Bandung, 2005), hlm. 125

Kedua, prinsip *ta'awun*. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya. Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah (QS. Al-Maidah [5]:2).⁴⁷

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 150

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”(QS. Al-Hujurat [49]:13).⁴⁸

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat di atas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu.

19. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat dalam Al-Qur'an

Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁴⁹

1. Pengembangan Diri yang Berkesinambungan

Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 126

⁴⁹*Ibid*, Ulfi Putra, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 39 No. 1

Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya membentuk sendiri sebuah organisasi yang mengarahkan dan memandu jalannya pemberdayaan. Menyerahkan kontrol pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak luar dapat menimbulkan ketergantungan dan justru mengganggu penanaman daya yang diinginkan.⁵⁰ Langkah ini telah ditegaskan Allah dalam Al Quran (QS. Ar-Ra'd (13):11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum maka niscaya tidak ada yang mampu menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd (13):11).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat dan komunitas penerima program pemberdayaan mampu mengubah nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.⁵¹

⁵⁰Moeljadi, *Exploring of coastal communities and economic empowermen to the environment impact in maritime. International, Journal of Management and Business Research*. Vol 8, No. 2, hlm. 223-231.

⁵¹Firmansyah, *Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar masin dan Kabupaten Tanah Lot*, Jurnal Agribisnis Pedesaan, Vol.2 No.1.

2. Pendidikan dan Pembinaan

Ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis pembinaan dan pendidikan keterampilan mutlak perlu dilakukan. Allah SWT berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "... niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah (58):11).

Ayat diatas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan skill dan ketrampilan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan taraf hidup. Hubungan 40 pendidikan dan pemberdayaan dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab mereka yang akan datang, dengan memaknai belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi seseorang.

20. Pengertian Desa

Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul otonomi desa menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵² Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan *cultural* yang terdapat

⁵² Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3

disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁵³ Menurut Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.⁵⁴ Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintahan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵ Menurut Binarto, Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik daerah lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusuma pengertian Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.⁵⁶

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berbentuk penelitian atau buku yang mengenai Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, pernah dikaji dan diteliti oleh peneliti terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang berhubungan dengan pembangunan Desa, pernah dilakukan oleh Muhammad Nazri dengan judul “Peran Pendamping Desa

⁵³ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa & Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm.22

⁵⁴ Candra Kusuma, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.

⁵⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

⁵⁶ Abu Ahmadi, Dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.241

Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan)” dalam penelitian Muhammad Nazri hanya berfokus pada Peran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa.⁵⁷

2. Penelitian yang juga memiliki kedekatan tema dengan penelitian skripsi ini pernah dilakukan oleh Martien Herna Susanti dengan skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.” Penelitian ini berfokus kepada Pendamping Desanya dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri.⁵⁸
3. Penelitian selanjutnya yang mempunyai kedekatan tema dengan skripsi ini pernah dilakukan oleh Maria Christina, Mahasiswi Universitas Lampung (UNILA) dengan skripsi yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” Tahun 2017. Penelitian ini berfokus kepada ketenaga kerjaan, beliau menyimpulkan bahwa tenaga Pendamping Lokal Desa Di Desa Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tidak memenuhi standar kriteria Pendamping Desa. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang peran dari Pendamping Desa yang berkedudukan di desa atau yang disebut dengan

⁵⁷Muhammad Nazri, *Peran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa* (Studi Di Gampong Keumumu Hulu Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, 2017)

⁵⁸Maria Christina, *Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa* di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, 2017.

Pendamping Lokal Desa untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah, dan juga lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁵⁹

4. Penelitian yang berhubungan dengan peran pendamping desa, pernah dilakukan oleh Rofika Dian dengan judul “Peranan Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dalam penelitian Rofika Dian Hamam hanya berfokus pada Peranan Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Durian Demang.

Maka, perbedaan antara judul penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu dilihat dari judul penelitiannya berbeda, tempat lokasi penelitiannya berbeda dari penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu, dan isinya juga berbeda dari penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiasi atau menjiplak karena penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan melihat kedudukannya dan juga tugas beserta fungsinya tersebut yang merupakan bentuk implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun desa. Penelitian ini terdapat kesamaan pada fokus penelitian yaitu kajian pendamping desanya dan masyarakat.

⁵⁹Rofika Dian, *Peranan Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah*, 2015

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari sumber seperti wawancara dan pengamatan. Peneliti mengumpulkan data dan menyajikan sedemikian rupa sehingga para informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena melalui fakta yang akurat.⁶⁰ Peneliti memilih desain penelitian ini untuk memahami lebih dalam subjek yang akan diteliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, Penelitian kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi.⁶¹ Orientasi penelitian kualitatif yaitu pada upaya memahami fenomena secara menyeluruh. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, membatasi studi dengan fokus.

⁶⁰Sudarwan Danin, *Menjadi peneliti kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan humaniora*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm.76

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.27

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Pada penelitian ini, lokasi peneliti yang akan di jadikan sebagai sumber penelitian yaitu di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, termasuk daerah terpencil dan padat penduduk. Penduduk Desa Bintang Meriah di dominasi suku Jawa, Batak. Mata pencarian penduduk pada umumnya adalah sebagai Pegawai Negeri, Swasta dan buruh harian lepas.

Desa Bintang Meriah terletak di dalam wilayah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan, sebelah Timur berbatasan dengan areal Desa Batang Kuis Pekan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakaran Batu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan. Waktu penelitian pada tanggal 17 Juli 2020 sampai 10 September 2020.

D. Informan Penelitian

Didalam suatu penelitian maka ada objek dan subjek. Objek penelitian merupakan apa yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan subjek adalah yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dengan demikian informan dari penelitian ini adalah pendamping desa Bapak Efrizal Rambe, pada bidang pemberdayaan masyarakat dan masyarakatnya yang bernama Ibu Yeni Efitia.

E. Sumber Data Penelitian

Data adalah suatu keterangan tentang sesuatu hal yang berupa suatu pengetahuan atau yang dianggap sebagai anggapan yang berarti suatu fakta

digambarkan lewat simbol, kode, angka, dan lain-lain yang dapat dimengerti.⁶²

Adapun sumber data secara garis besar yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan mengukur data dengan melewati prosedur yang dirancang secara khusus dan berdasarkan tujuannya.⁶³ Sumber data primer yang penulis ambil yaitu data utama yang diperoleh dari Pendamping Desa dan Masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi tentang arsip-arsip resmi yang terakait.⁶⁴ Sumber data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap dan pendukung dalam penelitian, pendamping desa dan masyarakat, buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur yang berkaitan dengan dengan penelitian tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang di perlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data primer dan skunder. Adapun yang menjadi data primer adalah data yang di proleh secara langsung berdasarkan informan di lapangan, untuk mendapatkan mengenai faktor-faktor yang akan diteliti melalui wawancara. Sebagai informan dalam penelitian yaitu para pendamping desa bapak Efrizal Rambe, pada bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah lampiran dokumentasi, buku-buku, jurnal, dan yang

⁶² Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

⁶³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 36

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 36

lainnya yang berkaitan dengan Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang akan di teliti. Dalam melakukan penelitian yang bersifat lapangan, maka kita harus menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau perbincangan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau langsung tatap muka.⁶⁵

Berdasarkan pengertian diatas penulis menganalisis bahwa wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang mencari informasi dengan yang memberi informasi. Kegiatan ini dilakukan secara berhadapan atau bertemu langsung antar pemberi informasi dengan penerima informasi, sehingga dengan dialog mereka pencari informasi dapat menerima data untuk ditulis.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁶⁶ Berdasarkan pengertian diatas penulis menganalisis bahwa observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, namun kegiatan atau keseharian itu diamati oleh orang-orang yang ingin mencari

⁶⁵S. Nasution, *Metode Research*, (: Jakarta PT. Ikrar Mandiriabadi, 2001), hlm. 113.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 106.

informasi. Dalam penelitian ini, yang akan di observasi adalah peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakatdesa Bintang Meriah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang akan saya sertakan adalah gambar. Berdasarkan pengertian diatas penulis menganalisis bahwa dokumentasi merupakan suatu benda penting yang ditinggalkan oleh lembaga, organisasi ataupun pemerintahan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor kesalahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan untuk memperoleh pengakuan terdapat terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Sepanjang pengetahuan peneliti bahwa teknik penjaminan kesalahan data merupakan upaya pengelola data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti yang dapat dipercaya kebenarannya dan sesudah seluruh data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah melalui instrumen pengumpul data. Teknik penjamin keabsahan data dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, untuk menyanggah apa yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif.

Dengan kata lain apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan dalam bab ini,

maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi. Untuk menjamin keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁷ Dalam teknik *triangulasi* informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan, dan dokumen. Teknik *triangulasi* bermaksud untuk menguji kebenaran data yang telah diperoleh. Hal-hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen-dokumen lainnya.⁶⁸

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menemukan unsur-unsur dalam bahan-bahan yang dikumpulkan untuk menambah penambahan sendiri ini bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain dan data yang baru dapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi wawancara dan studi dokumen dengan cara menyusun data menghubungkan data penyajian data narikan simpulan atau verifikasi. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dilakukan sepanjang penelitian.

Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan

⁶⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 330.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 145-146.

kesimpulan. Dimana proses berlangsungnya secara *sirkuler* selama proses berlangsung.

1. Reduksi data

Miles dan Huberman dalam Salim dan Syahrul menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁶⁹ Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulannya bahwa reduksi data adalah proses memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya, reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian penggolongan dan menulis memo. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman dalam Salim dan Syahrul penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang diberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷⁰ Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis, grafik, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami sehingga penulis dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 148

⁷⁰*Ibid*, hlm. 149-150.

3. Menarik Kesimpulan/verifikasi

Setelah data disajikan yang juga dalam rangka analisis data maka proses data selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektivitas. Tegasnya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan harus memverifikasi merupakan suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Bintang Meriah

Desa Bintang Meriah merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, luas 0,65 km², jumlah penduduk 6640 jiwa dan kepadatan 50 jiwa/km². Setiap per-tahun pertumbuhan penduduk di Bintang Meriah meningkat 5 persen, ditahun 2016 jumlah pertumbuhan penduduk yang laki-laki lebih tinggi daripada jumlah penduduk yang perempuan. Berdasarkan penjelasan tersebut laki-laki jumlahnya 3347 sedangkan perempuan jumlahnya 3293.

Desa Bintang Meriah dihuni penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Islam, Kristen, Katholik, Budha. Islam jumlah penduduknya 6446 sedangkan Kristen:130, Katholik:28, Budha:36. Dengan total jumlah penduduk berjumlah 6640 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 5 persen pertahun dengan kepadatan rata-rata 50 jiwa pekilometer persegi.

B. Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peran yang penting dan dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa. Pendamping merupakan fasilitator atau agen perubahan yang memiliki motivasi dan *idealisme* yang tinggi untuk dapat mengabdikan serta menjadi bagian dari proses pembangunan di desa. Pendamping

desa memiliki peranan yang lengkap mulai dari kader pendamping desa yang ditempatkan di desa dan tenaga pendamping profesional yang terdiri dari pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang ada di provinsi. Pendamping desa memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan di perkuliahaan untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam pembangunan di masyarakat desa. Mereka dapat memberikan semangat, pengetahuan, inspirasi dan akses baru bagi masyarakat untuk lebih bekerja keras dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan pembangunan di pedesaan. Selain itu mereka diharapkan membantu dalam mengelola Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) mulai dari merencanakan, melaksanakan, memonitoring, evaluasi dan melaporkan pertanggung jawaban supaya tepat sasaran dan tepat anggaran dari program pembangunan desa.

Pendamping di Desa Bintang Meriah yaitu berupa pendampingan yang bersifat *partisipatoris*, yang terfokus pada pengembangan pertanian dan kemandirian petani padi. Pengembangan ini berupa peningkatan *skill* dan kemampuan masyarakat dalam hal pengolahan padi secara maksimal sehingga di harapkan dengan adanya kemampuan dan skill ini menjadi perantara kemakmuran masyarakat petani padi. Peningkatan kreatifitas ini berupa *experiment* bersama masyarakat seperti halnya *experiment* pembuatan pakan ternak dari batang jerami padi, kompos jerami padi sebagainya. Namun *experiment* bersama ini akan dilakukan atas dasar inisiatif, persetujuan dan pilihan masyarakat. Namun

pengembangan kreatifitas ini lebih terfokus pada pembentukan secara bekal atau secara general fokus pendampingan ini tertuju pada peningkatan ekonomi.

Pendamping desa dapat berperan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan mengelola dan melaoprkan penggunaan dana desa dan 46 menghindari potensi korupsi. Di samping itu juga dengan membantu pelaksanaan menejemen pelayanan publik, pengembangan usaha ekonomi di desa, dan mendayagunakan sumber daya alam serta teknologi tepat guna. Selain berperan mendampingi, pendamping desa juga menjadi fasilitator, mediator dan mitra bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, potensi sumber daya yang dimiliki dan menemukan prospek pembangunan di desa. Mereka juga dapat:

1. Menjadi agen pembangunan desa yang dapat memonitor, mengevaluasi dan mengaspirasikan kepada pihak pemerintah daerah serta wakil rakyat tentang permasalahan, keadaan dan kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya yang dimiliki dan prospek yang ditemukan.
2. Membentuk dan memperkuat kelembagaan ekonomi khususnya generasi muda di desa untuk menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan atau usaha di desa, sehingga generasi muda tidak lagi meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan diperkotaan (*urbanisasi*).
3. Membangun dan memperluas akses jaringan dengan perguruan tinggi mulai dari mahasiswa, alumni dan dosen untuk dapat membantu serta

bekerjasama dalam memajukan pembangunan masyarakat desa dengan program riset, pengabdian masyarakat, kuliah praktikum, kerja praktek, magang dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Jadi, perlunya peran pendamping desa tersebut untuk memfasilitasi masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan.

C. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah

Pemberdayaan di Desa Bintang Meriah dapat di lihat dari peran yang sangat signifikan diantaranya, pemberdayaan bidang pertanian dimana peran pendamping desa dalam upaya meningkatkan hasil panen pada yang awalnya masa tanam 1 tahun 2 x sekarang hingga 3 x, di bidang ibu PKK adanya pendampingan kerativitas dan kerajinan berupa pembuatan sabun yang sudah dipasarkan, menyadarkan masyarakat peduli lingkungan bersih, pengelolaan sampah menjadi bank sampah dan pengelohan sampah menjadi peningkatan ekonomi masyarakat bintang meriah.⁷¹

Tugas pokok, output kerja dan indikator dari Pendamping Desa.

No	Tugas Pokok	Output Kerja	Indikator
1	Mendampingi Desa	Perencanaan dan penganggaran	a) Terlaksananya sosialisasi Undang-undang No.6

⁷¹ Yeni Efita, Masyarakat Desa Bintang Meriah, Wawancara, (Medan, 21 Juli 2020). Pada Pukul: 14:00 WIB

	Dalam Perencanaan Pembangunan dan keuangan	Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan turunannya. b) Terfasilitasinya musyawarah Desa yang Partisipatif untuk menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes;
2	Mendampingi Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Desa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	a) Adanya Koordinasi Dengan PD dan pihak Terkait Mengenai Pembangunan Desa; b) Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. c) Terfasilitasinya ketersediaan informasi publik terkait pembangunan desa
3	Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Terlaksananya pendampingan penguatan lembaga kemasyarakatan Desa (LKD), kelompok perempuan dan kelompok rentan (difabel/kebutuhan khusus, kelompok masyarakat miskin dan marginal)	a) Pelembagaan Kelompok yang ada di desa diakui sebagai LKD b) Adanya SK Kades tentang LKD c) Keterlibatan aktif LKD dan kelompok rentan dalam setiap proses tahapan pembangunan

4	Mendampingi Desa dalam Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa	Proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	a) Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa; b) Terlaksananya evaluasi pembangunan Desa melalui musyawarah desa; c) Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan.
5	Mendorong Terlaksananya Prinsip prinsip tata kelola desa yang partisipatif, Transparan, dan akuntabel	Terlaksananya tata kelola desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel	a) Adanya sarana informasi pembangunan Desa b) Adanya dokumen keterlibatan aktif masyarakat desa c) Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban pembangunan desa
6	Memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa	Teridentifikasinya potensi pengembangan ekonomi Desa	a) Dokumen identifikasi/pemetaan potensi ekonomi Desa b) Data potensi kelembagaan ekonomi Desa

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri. Seperti di Desa Bintang Meriah pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengadaan obat-obat kesehatan poskesdes yang berguna untuk kepentingan masyarakat berobat gratis di poskesdes di desa.
2. Pengadaan sumur bor untuk khalayak masyarakat yang belum mempunyai air bersih.
3. Pengadaan jalan poros di setaiap dusun yakni pembuatan paving block untuk masing-masing gang di susun yang membuat jalanan lancar.
4. Pembuatan rambu-rambu jalan desa warga dan masyarakat luar desa Bintang Meriah mengetahui letak wilayah desa.
5. Mengadakan pelatihan kepada kader-kader PKK yang berguna daya untuk di manfaatkan kemudian harinya.
6. Kegiatan gotong royong yang bersumber dari keinginan masyarakat tiap dusun yang di pimpin oleh Kepala Dusun masing-masing.
7. Kegiatan sosialisasi dari pihak keluarga berencana (KB) untuk program kampung KB.

D. Tahapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi program pemberdayaan yang telah disepakati kepada masyarakat di desa dengan cara menyebarkan program tersebut ke setiap Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelembagaan yang ada di masyarakat, kelompok tani, kelompok usaha, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tokoh masyarakat. Setelah menyebarkan studi literatur dan analisis dokumen observasi, pencarian informasi dan pendekatan diskusi teman sejawat, ahli dan praktisi hasil riset, jurnal ilmiah, buku teks dan media massa pencarian informasi langsung (wawancara) dan menjalin akses serta kemitraan berdiskusi hasil studi literatur, analisis dokumen, observasi dan wawancara menjalin komunikasi secara informal dan terbuka dan dialogis. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat menyepakati agenda kegiatan pemberdayaan secara partisipatif.⁷² Program pemberdayaan kemudian dibahas dan disepakati serta diprioritaskan pelaksanaan pemberdayaan dalam forum rembuk desa dan musyawarah desa.
2. Melaksanakan penyuluhan, untuk menciptakan kesadaran, memberikan motivasi dan pengetahuan tentang program pemberdayaan yang akan dilaksanakan sesuai prioritas yang telah disepakati. Penyuluhan dapat menggunakan media untuk menayangkan profil keberhasilan kelompok tani

⁷² Efrisal, Pendamping Desa Bintang Meriah, Wawancara, (Medan, 21 Juli 2020). Pada Pukul: 14:00 WIB

atau usaha sebagai contoh kepada masyarakat supaya termotivasi dan terinspirasi serta dapat mengadopsi inovasi.

3. Melaksanakan kajian hasil kegiatan penyuluhan untuk dievaluasi dan dianalisis serta dibuat rancangan program pelatihan yang di butuhkan supaya masyarakat setelah mendapat pengetahuan dan pemahaman dilanjutkan dengan memiliki keterampilan. Menentukan metode, sasaran (*beneficiaries*), tempat, perlengkapan, peralatan, fasilitator, instruktur dan agenda kegiatan pelatihan.
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai kesepakatan program dan hasil pelaksanaan penyuluhan. Pelatihan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan dibantu lahan atau media pelatihan, peralatan dan perlengkapan pelatihan. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pendamping desa dengan melibatkan atau bekerjasama dengan para penyuluh, praktisi dan ahli baik dari dinas pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Sebagaimana menurut Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia peran pendamping desa diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan desa *inovatif* baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tahapan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan melalui pengamatan langsung, analisis dokumentasi, dan wawancara secara informal, dapat menyebarkan angket dan forum dialog terbuka dengan peserta, pelaku dan penerima manfaat program pemberdayaan. Hasil monitoring evaluasi akan menentukan

kelanjutan program pemberdayaan yang dapat kembali lagi pada tahap penyuluhan dan pelatihan lanjutan pada bidang yang sama, atau sudah berlanjut pada program yang lain.

6. Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dari hasil penyuluhan dan pelatihan untuk bisa menjalankan program pemberdayaan yang sudah disepakati dan bersumber dari permasalahan serta potensi sumber daya masyarakat desa.
7. Menejemen pengembangan dan penguatan kelembagaan, yang dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pendampingan. Hal tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kegiatan lanjutan, seperti adanya pelatihan peningkatan produksi, peningkatan dan penguatan kelembagaan dengan pelatihan menejemen organisasi, administrasi, dan keuangan.⁷³
8. Kaderisasi pendamping, fasilitator dan aktor pemberdayaan khususnya dari generasi muda di masyarakat desa.
9. Menejemen promosi, pemasaran dan membuka serta menjalin akses kemitraan baik dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak swasta.

E. Keunggulan dan Hambatan Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Desa Bintang Meriah

Keunggulan pendamping desa dalam Pemberdayaan Desa Bintang Meriah sebagai berikut:

⁷³ Efrisal, Pendamping Desa Bintang Meriah, Wawancara, (Medan, 21 Juli 2020). Pada Pukul: 14:00 WIB

1. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJM desa, RKP desa dan APB desa harus disusun langsung oleh masyarakat desa setempat yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan sekretaris desa, bendahara dan lainnya.
2. Bersama-sama dengan kepala Desa dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok UMKM dan kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.
3. Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok UMKM dan pemuda dan kelompok ibu-ibu di desa Bintang Meriah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pendamping desa melaksanakan pertemuan-pertemuan yang didalamnya pendamping desa berbincang-bincang atau berdiskusi dengan masyarakat untuk membantu mengembangkan dan menggali potensi untuk

menemukan peluang yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di Desa Bintang Meriah.

4. Melakukan koordinasi dengan kader-kader seperti kader posyandu, kader pembangunan manusia yang berguna untuk pencegahan stunting dan keadaan kesehatan masyarakat.⁷⁴

Di dalam sebuah pekerjaan pasti ada suatu penghambat yang kita dapat di lapangan baik itu formal atau pun non formal, diantaranya yaitu:

- a. Gaji yang diberikan masih sangat rendah tidak sesuai dengan beban kerjanya atau Minimnya honor Pendamping Lokal Desa, permasalahan ini yang menjadi hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan fungsi pendampingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Bintang Meriah adalah minimnya honor yang diterima pendamping lokal desa. Hal ini juga dibenarkan oleh Efrisal Rambe selaku Pendamping Lokal Desa Bintang Meriah: *“..bukannya kami tidak mensyukuri namun memang honor yang kita terima masih sangat minim, sehingga hal tersebut menjadi kendala, adapun honor yang kita terima lebih kurang 2,2 juta, semuanya biaya yang diperlukan melebihi dari angka tersebut, karena kita tidak ada biaya perjalanan dinas, sementara kita seminggu hampir 5 kali melakukan kunjungan ke desa-desa, meskipun desa yang berbeda-beda.”*⁷⁵

⁷⁴ Efrisal, Pendamping Desa Bintang Meriah, Wawancara, (Medan, 21 Juli 2020). Pada Pukul: 14:00 WIB

⁷⁵ Efrisal, Pendamping Desa Bintang Meriah, Wawancara, (Medan, 21 Juli 2020). Pada Pukul: 14:00 WIB

b. Luasnya Wilayah Pendampingan atau Binaan, permasalahan ini yang menjadi hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan fungsi pendampingan adalah luasnya wilayah pendampingan, dikarenakan jarak satu desa dengan desa lainnya yang cukup jauh, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Efrisal Rambe selaku Pendamping Lokal Desa Bintang Meriah: *“yang menjadi kendala utama kita juga adalah luasnya wilayah kerja kita, sebab desa di sini kan jaraknya jauh-jauh antara satu desa dengan desa lain.”*Pernyataan ini menggambarkan bahwa wilayah kerja Pendamping Lokal Desa tidak hanya satu desa, namun beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Batang Kuis, sehingga jarak antar desa yang jauh tersebut terkadang menjadi kendala bagi pendamping dalam melakukan pendampingan.

BAB V **Penutup**

A. Kesimpulan

Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat bukan hanya melakukan pendampingan pelaksanaan dan hasil pemberdayaan, tetapi berperan secara aktif mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, melalui kegiatan sosialisasi program, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, kemitraan dan menciptakan kemandirian. Pendamping memiliki peran yang penting dan dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa. Perlunya peran pendamping desa tersebut untuk memfasilitasi masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Desa Bintang Meriah pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengadaan obat-obat kesehatan poskesdes yang berguna untuk kepentingan masyarakat berobat gratis di poskesdes di desa.
2. Pengadaan sumur bor untuk khalayak masyarakat yang belum mempunyai air bersih.
3. Pengadaan jalan poros di setaiap dusun yakni pembuatan *paving block* untuk masing-masing gang di susun yang membuat jalanan lancar.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pendamping Desa dalam Pemberdayaan ialah:

1. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih partisipatif dalam pembangunan desa.
2. Mengoptimalkan pelatihan administrasi bagi aparatur desa agar tidak kesulitan dalam pelaporan kegiatan pembangunan desa.
3. Meningkatkan kerja sama desa satu dengan lainnya agar dapat mendirikan BUMDes yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain di Kecamatan Batang Kuis.
4. Meningkatkan kerja sama pendamping desa dengan masyarakat dalam pemberdayaan di desa Bintang Meriah.
5. Pemberdayaan sumber daya masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat Bintang Meriah melalui pelatihan yang dilaksanakan pendamping desa.
6. Peningkatan SDM dan mutu layanan ekonomi masyarakat Bintang Meriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto, 2002, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta :LP FEUI.
- Agustiani Firly Nur, 2020, *Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa*, Vol. IV. Ed. 17 Diakses Pada Tanggal 10 Oktober, Pada Pukul 19:00. WIB.
- Ahmadi Abu Dkk, 1991, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa & Kota dan Permasalahannya* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Coastal Community Development Project (CCDP), 2015, *Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*, Jakarta: CCDP.
- Cristenson James, 1989 Jerry W. Robinson, *Community development in perspective*, Jr Ames: Ioa State Univercity Press.
- Danin Sudarwan, 2002, *Menjadi peneliti kualitatif:Ancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan humaniora*, Bandung : Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4.
- Dianto Icol, 2020, *Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan*, Vo. 18, No. 2. Diakses Pada Tanggal 17 Oktober.
- Effendy Nasrul, 1998, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Efita Yeni, 2020, *Masyarakat Desa Bintang Meriah*, Wawancara, Medan, 21 Juli, Pada Pukul: 14:00 WIB.
- Efrisal, 2020, *Pendamping Desa Bintang Meriah*, Wawancara, Medan, 06 Maret, Pada Pukul 14:00 WIB.

- Firmansyah, *Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar masin dan Kabupaten Tanah Lot*, Jurnal Agribisnis Pedesaan, Vol.2 No.1.
- Handini Sri, Sukesi, Hartati Kanti Astuti, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hartomo, 2008, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan Iqbal, 2002, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herna Martien, 2020 *Pendamping Desa dan Desa Mandiri*, Vol.37 No.1 2017 Diakses Pada Tanggal 10 Maret, Pada Pukul 14:00. WIB.
- J Moleong Lexy, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karianga Hendra, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana.
- Kartasasmitha Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Kusuma Candra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.
- Machendrawati Nanih, Agus Ahmad Safei, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maryani Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3.
- Moeljadi, *Exploring of coastal communities and economic empowermen to the environment impact in maritime. International, Journal of Management and Business Research*.Vol 8, No. 2.
- Mukmin Hasan, 2014, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah*

Lampung, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

Mulyati Purwasasmita, *Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat*, Vol. 18, NO. 3

Munir, 2009, *Metode dakwah*, Jakarta: Kencana.

Najiyati Sri, Dkk, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

S. Nasution, 2001, *Metode Research*, Jakarta PT. Ikrar Mandiriabadi.

Sany Ulfi Putra, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 39 No. 1.

Setyawan Dodiet Aditya, 2012, *Konsep Dasar Masyarakat*, Surakarta: Program Studi Diploma IV Komunitas Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes.

Shadili Hassan, 1980, *Sosiologi Untuk Masyarakat*, Surabaya: Pustaka Sarjana.

Soelaiman M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Eresco.

Suharto Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Revika Aditama.

Sumodiningrat Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Offiset.

Syarfi'i Agus Ahmad, 2007, *Menejemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.

Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yefni, 2018, *Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat*, Masyarakat Madani, III, 02 Desember.

Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media.

Zubaedi, 2014, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama, Posisi, Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Nama : Efrisal Rambe

Posisi : Selaku Pendamping Desa di Desa Bintang Meriah

Hari : Senin

Tanggal : 6 Maret 2020

Tempat : Di Kantor Kepala Desa

Lampiran

Daftar Wawancara Pendamping Desa di Desa Bintang Meriah

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan ataupun dilakukan pak?	<p>Program-programnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan masyarakat dalam bangunan. Seperti, Pelatihan masyarakat, Sosialisasi bagaimana anggaran desa lebih baik lagi.2. Meningkatkan dan memfasilitasi penggunaan anggaran desa berkelanjutan. <p>Untuk pada tahun 2020 saat ini program nya yang dilakukan yaitu :</p>

		<p>a. Pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. Pembangunan.</p>
2.	<p>Apa saja keberhasilan yang sudah dilakukan di dalam pendampingan desa tersebut kepada bapak?</p>	<p>Keberhasilannya sampai saat ini khususnya dibidang pembangunan desa sudah mencapai hampir lebih kurang pembangunan yang dikerjakan di desa seperti jalan desa, yaitu pangking blok, drainase, rabat beton, tembok penahan tebing dan lain sebagainya. Di bidang pemberdayaan sudah banyak yang dilaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan di bidang ekonomi kreatif masyarakat baik di bidang pengrajin seperti pembuatan tali kor dibuat jadi tas, dan bahan-bahan tak terpakai menjadi bisa digunakan untuk penambahan pendapatan masyarakat, masih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan seperti kegiatan posyandu, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga binasia.</p>
3.	<p>Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Bintang Meriah kepada Bapak tersebut?</p>	<p>Pelaksanaan pemberdayaan desa Bintang Meriah berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pemberdayaan yang dapat dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengadaan obat-obat kesehatan poskesdes yang berguna untuk kepentingan masyarakat berobat gratis di poskesdes di desa.</p> <p>b. Pengadaan sumur bor untuk khalayak</p>

		<p>masyarakat yang belum mempunyai air bersih.</p> <p>c. Pengadaan jalan poros di setiap dusun yakni pembuatan paving block untuk masing-masing gang di susun yang membuat jalanan lancar.</p> <p>d. Pembuatan rambu-rambu jalan desa warga dan masyarakat luar desa Bintang Meriah mengetahui letak wilayah desa.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan kepada kader-kader PKK yang berguna daya untuk di manfaatkan kemudian harinya.</p> <p>f. Kegiatan gotong royong yang bersumber dari keinginan masyarakat tiap dusun yang di pimpin oleh Kepala Dusun masing-masing.</p> <p>g. Kegiatan sosialisasi dari pihak keluarga berencana (KB) untuk program kampung KB.</p>
4.	<p>Apa saja keunggulan dan hambatan desa dalam pemberdayaan desa Bintang Meriah Pak?</p>	<p>Keunggulan Desa dalam Pemberdayaan Desa Bintang Meriah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam penyusunan RPJM desa, RKP desa dan APB desa, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan pembangunan masyarakat harus

		<p>dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJM desa, RKP desa dan APB desa harus disusun langsung oleh masyarakat desa setempat yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan sekretaris desa, bendahara dan lainnya.</p> <p>2. Bersama-sama dengan kepala desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok UMKM dan kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.</p> <p>3. Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok UMKM dan pemuda dan kelompok ibu-ibu di desa Bintang Meriah.</p>
--	--	--

		<p>Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pendamping desa melaksanakan pertemuan-pertemuan yang didalamnya pendamping desa berbincang-bincang atau berdiskusi dengan masyarakat untuk membantu mengembangkan dan menggali potensi untuk menemukan peluang yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan di desa Bintang Meriah.</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan kader-kader seperti kader posyandu, kader pembangunan manusia yang berguna untuk pencegahan stunting dan keadaan kesehatan masyarakat.</p> <p>Di dalam sebuah pekerjaan pasti ada nya suatu penghambat yang kita dapat di lapangan baik itu formal atau pun non formal, diantaranya yaitu:</p> <p>1. Gaji yang diberikan masih sangat rendah tidak sesuai dengan beban kerjanya atau Minimnya honor Pendamping Lokal Desa.</p> <p>Permasalahan ini yang menjadi hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan fungsi pendampingan</p>
--	--	---

		<p>pada proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Bintang Meriah adalah minimnya honor yang diterima pendamping lokal desa. Hal ini juga dibenarkan oleh Efrisal Rambe selaku Pendamping Lokal Desa Bintang Meriah:</p> <p><i>“..bukannya kami tidak mensyukuri namun memang honor yang kita terima masih sangat minim, sehingga hal tersebut menjadi kendala, adapun honor yang kita terima lebih kurang 2,2 juta, semuanya biaya yang diperlukan melebihi dari angka tersebut, karena kita tidak ada biaya berjalanan dinas, sementara kita seminggu hampir 5 kali melakukan kunjungan ke desa-desa, meskipun desa yang berbeda-beda.”</i></p> <p>2. Luasnya Wilayah Pendampingan atau Binaan</p> <p>Permasalahan ini yang menjadi hambatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan fungsi pendampingan adalah luasnya wilayah pendampingan, dikarenakan jarak satu desa dengan desa lainnya yang cukup jauh, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Efrisal Rambe selaku Pendamping Lokal</p>
--	--	---

		<p>Desa Bintang Meriah: “yang menjadi kendala utama kita juga adalah luasnya wilayah kerja kita, sebab desa di sini kan jaraknya jauh-jauh antara satu desa dengan desa lain.” Pernyataan ini menggambarkan bahwa wilayah kerja Pendamping Lokal Desa tidak hanya satu desa, namun beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Batang Kuis, sehingga jarak antar desa yang jauh tersebut terkadang menjadi kendala bagi pendamping dalam melakukan pendampingan.</p>
5.	<p>Menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Bintang Meriah tersebut?</p>	<p>Pelaksanaan pemberdayaan di desa bintang meriah dapat di lihat dari peran yang sangat signifikan diantaranya, pelaksanaan pemberdayaan di bidang pertanian dimana peran pendamping desa dalam upaya meningkatkan hasil panen padi yan awalnya masa tanam 1 tahun 2 x sekarang hingga 3 x, di bidang ibu pkk adanya pendampingan kerativitas dan kerajinan berupa pembuatan sabun yang sudah di pasarkan, menyadarkan masyarakat meriah peduli lingkungan bersih, pengelolaan sampah menjadi bank sampah dan pengelohan sampah menjadi peningkatan ekonomi masyarakat bintang meriah.</p>

Dokumentasi



Foto saat wawancara bersama Bapak Efrisal Rambe selaku pendamping desa



Foto ini diambil pada waktu wawancara bersama Ibu Yeni Elfita salah satu masyarakat di Desa Bintang Meriah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

1. Nama : Kiki Ahda Nasution
2. NIM : 0103162020
3. Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
4. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 13 Febuari 1998
7. Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara
8. Alamat : Jalan Ampera No. 107 Batang Kuis, Deli Serdang
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah :Ali Sakti Nasution
 - b. Ibu : Sartik Saragih
10. Alamat Orang Tua :
 - a. Ayah :Jalan Ampera No. 107 Batang Kuis, Deli Serdang
 - b. Ibu :Jalan Ampera No. 107 Batang Kuis, Deli Serdang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Kiki Ahda Nasution

NIM : 0103162020

Judul : "Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli

AnggotaPenguji

1. Dr. H. Muniruddin, MA
NIP. 196412012014111001.....

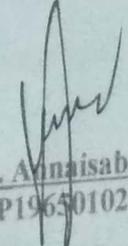
2. Dr. Efi Brata Madya, M.Si
NIP. 19670610 1994031003.....

3. Dr. Hj. Fatma Yulia, MA
NIP. 197607212005012003.....

4. Dr. H. Muaz Taniung, MA
NIP. 19661019 2005011003.....

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 22 Januari 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan PMI

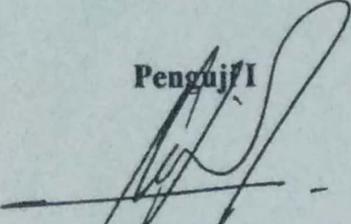

Dr. Annaisaburi Nst, M.Ag
NIP19650102199703 1001

PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

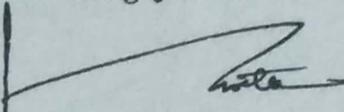
Skripsi yang berjudul :Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, An. Kiki Ahda Nasution telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Januari 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 22 Januari 2021

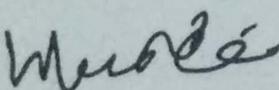
Penguji I


Dr. H. Muniruddin, MA
NIP. 196412012014111001

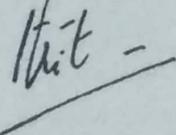
Penguji II


Dr. Efi Brata Madya, M.Si
NIP. 19670610 1994031003

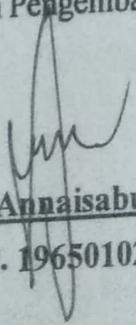
Penguji III


Dr. Hj. Fatma Yulia, MA
NIP. 197607212005012003

Penguji IV


Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 2005011003

Mengetahui
An. Dekan
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Annaisaburi Nst, M.Ag
NIP. 19650102199703 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan William Iskandar Pasir V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683

www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, An. Kiki Ahda Nasution telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Januari 2021, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Dr. Annasaburi Nst, M.Ag
NIP. 19650102 199703 1001

Sekretaris

Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA
NIP. 197507252007031001

Anggota Penguji

1. Dr. H. Muniruddin, MA
NIP. 196412012014111001
2. Dr. Efi Brata Madya, M.Si.
NIP. 19670610 1994031003
3. Dr. Hj. Fatma Yulia, MA
NIP. 197607212005012003
4. Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 2005011003

Mengetahui

DEKANO FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA



Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP. 19620411 1989021002